



**ANALISIS DETERMINAN *TAX AGGRESSIVENESS*
PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2010-2013**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Siswianti

NIM 7211411043

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : JUM'AT

Tanggal : 7 AGUSTUS 2015

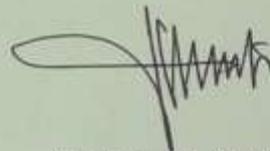
Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dis. Fachrurrozie, M.Si
NIP. 196206231989011001

Pembimbing



Kiswanto, SE., M.Si
NIP. 198309012008121002

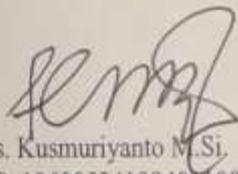
PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : SELASA

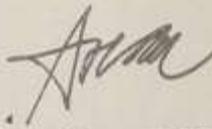
Tanggal : 1 SEPTEMBER 2015

Penguji I



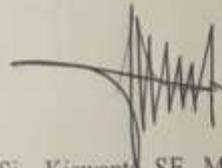
Drs. Kusmuriyanto M.Si.
NIP. 196005241984031001

Penguji II



Trisni Suryarini, SE., M.Si.
NIP. 197804132001122001

Penguji III



Kiswanto, SE., M.Si.
NIP. 198309012008121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



D. Wahyono M.M
NIP. 195601031983121001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Juni 2015



Siswianti
NIM 7211411043

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- “Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti menuju surga.” (Nabi Muhammad SAW)
- “Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah.” (HR. Muslim)
- “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar-Ra’d:11)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Orang tua tercinta Ibu Rofi’ah dan Bapak Suroto yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do’a yang senantiasa mengiringi setiap langkah keberhasilanku
- Adikku tercinta Susmiarti dan Khilyatus Syifa’ yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat
- Teman kos Seti, Ela dan teman seperjuangan Ulya, Wahyu, Yani, Putri, Nana yang memberikan semangat dan dukungan
- Teman-teman Akuntansi A 2011
- Almamaterku Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan berkah-Nya yang tiada terbatas dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS DETERMINAN TAX AGGRESSIVENESS PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2013”. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat banyak dorongan, bantuan, saran, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
4. Kiswanto, SE., M.Si., Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dan waktu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Drs. Kusmuriyanto, M.Si., Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

6. Trisni Suryarini, SE., M.Si., Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Drs. Kusmuriyanto, M.Si., selaku Dosen Wali Akuntansi A 2011 yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan bantuan selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan bantuan selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah membantu dalam proses perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis sangat menerima saran, kritik, dan masukan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Semarang, Juni 2015

Penulis

SARI

Siswianti. 2015. “Analisis Determinan *Tax Aggressiveness* Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Kiswanto, SE., M.Si.

Kata Kunci: *Tax Aggressiveness, Corporate Social Responsibility, Komite Audit, Leverage, Ukuran Perusahaan.*

Tindakan agresivitas pajak masih banyak dilakukan oleh perusahaan besar di Indonesia karena pajak dianggap sebagai biaya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan dan memiliki dampak langsung terhadap profitabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komite audit terhadap *leverage*, pengaruh komite audit, *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax aggressiveness*, pengaruh komite audit terhadap *tax aggressiveness* melalui *leverage*.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan multinasional *non-finance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode tersebut diperoleh sampel perusahaan sebanyak 124 perusahaan. Alat analisis untuk menguji hipotesis adalah *path analysis* dengan software AMOS versi 21.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *leverage*. *Corporate Social Responsibility* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Komite audit dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa *leverage* tidak dapat memediasi pengaruh komite audit terhadap *tax aggressiveness*.

Simpulan dari penelitian ini adalah perusahaan yang berukuran besar dan perusahaan yang mengungkapkan CSR dalam laporan tahunannya lebih agresif terhadap pajak, sehingga pemerintah perlu mengadakan kerjasama atau membuat peraturan mengenai pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan agar pengungkapan CSR perusahaan lebih efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat, seperti pemotongan pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

ABSTRACT

Siswianti. 2015. "The Determinants of Analysis Tax Aggressiveness in Multinational Companies Listed on Indonesia Stock Exchange in 2010-2013". Final Project. Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor: Kiswanto, SE., M.Si.

Keywords: Tax Aggressiveness, Corporate Social Responsibility, Audit Committee, Leverage, Company Size.

Aggressiveness taxes actionis more still do by the big company in Indonesia because the tax deemed to be a expense has significant effect on company and have direct impact on profitability. The aims of this research are to examine the effects of audit committee on leverage, to find the effects of audit committee, corporate social responsibility, company size, and leverage on tax aggressiveness, to detect the effects of audit committee on tax aggressiveness through leverage.

The population in this research is non-finance multinational company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010-2013. In the selection of the sample the study uses purposive sampling method. Under this method, the company obtained a sample of 124 companies. The tool to analyze this hypothesis is path analysis using AMOS software version 21.

The results of this research indicate that audit committee has a positive effect on leverage. Corporate Social Responsibility and company size has a positive effect on tax aggressiveness. The audit committee and leverage has no effect on tax aggressiveness. The results of this to find that leverage can not mediating audit committee effect on tax aggressiveness.

The conclusion of this research is the big sized company and companies that disclose CSR in annual report do agresiver on tax, so the government must cooperation or using regulation about disclosure CSR so that disclosure CSR company more effective and appropriate with expectation society, like tax cutting in care of company.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	12
1.3.Tujuan Penelitian	13
1.4.Manfaat Penelitian	13
BAB II TELAAH TEORI	
2.1.Teori Keagenan	15
2.2.Teori Legitimasi	18
2.3. <i>Tax Aggressiveness</i>	19

2.4. Komite Audit	23
2.5. <i>Corporate Social Responsibility</i>	25
2.6. Ukuran Perusahaan	26
2.7. <i>Leverage</i>	27
2.8. Penelitian Terdahulu	29
2.9. Kerangka Pemikiran Teoritis	35
2.10. Pengembangan Hipotesis	36
2.10.1. Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Leverage</i>	36
2.10.2. Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>	38
2.10.3. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax</i> <i>Aggressiveness</i>	39
2.10.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax</i> <i>Aggressiveness</i>	40
2.10.5. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>	41
2.10.6. Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> melalui <i>Leverage</i>	43

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian	45
3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	45
3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	47
3.3.1. Variabel <i>Endogeneous</i>	47
3.3.2. Variabel <i>Exogeneous</i>	48
3.3.2.1. Komite Audit	48

3.3.2.2. <i>Corporate Social Responsibility</i>	48
3.3.2.3. Ukuran Perusahaan	49
3.3.3. Variabel <i>Intervening</i>	50
3.4. Metode Pengumpulan Data	51
3.5. Metode Analisis Data	52
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif	52
3.5.2. Uji <i>Goodness of Fit</i> Model	52
3.5.3. Pengujian Hipotesis	55
3.5.4. Uji Sobel (<i>Sobel Test</i>)	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	57
4.1.1. Statistik Deskriptif	57
4.1.1.1. <i>Tax Aggressiveness</i>	57
4.1.1.2. Komite Audit	58
4.1.1.3. <i>Corporate Social Responsibility</i>	59
4.1.1.4. Ukuran Perusahaan	60
4.1.1.5. <i>Leverage</i>	61
4.1.2. Uji <i>Goodness of Fit</i> Model	62
4.1.3. Pengujian Hipotesis	64
4.1.4. Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	67
4.1.5. Uji Sobel (<i>Sobel Test</i>)	72
4.2. Pembahasan	73
4.2.1. Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Leverage</i>	73

4.2.2.	Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>	75
4.2.3.	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>	77
4.2.4.	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>	79
4.2.5.	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>	81
4.2.6.	Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> melalui <i>Leverage</i>	83
BAB V PENUTUP		
5.1.	Simpulan	85
5.2.	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		88
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1. Kriteria Pengambilan Sampel	46
Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel	51
Tabel 3.3. <i>Goodness-of-fit Model</i>	55
Tabel 4.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif <i>Tax Aggressiveness</i>	57
Tabel 4.2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Komite Audit	58
Tabel 4.3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif CSR	59
Tabel 4.4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Ukuran perusahaan	60
Tabel 4.5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif <i>Leverage</i>	61
Tabel 4.6. Hasil Pengujian Kelayakan Model.....	62
Tabel 4.7. Hasil Analisis <i>Regression Weights</i>	65
Tabel 4.8. Hasil Estimasi <i>Standardized Direct Effects</i>	68
Tabel 4.9. Hasil Estimasi <i>Standardized Indirect Effect</i>	68
Tabel 4.10. Total Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung	69
Tabel 4.11. Hasil Pengujian Hipotesis	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.Kerangka Pemikiran Teoritis	36
Gambar 4.1.Model <i>Path Diagram</i> Hasil Pengujian <i>Goodness of Fit Model</i> ..	62
Gambar 4.2. <i>Path Diagram</i>	70

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan Sampel	93
Lampiran 2 Item-Item Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	94
Lampiran 3 Hasil Perhitungan <i>Corporate Social Responsibility</i>	97
Lampiran 4 Hasil Perhitungan Komite Audit	98
Lampiran 5 Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan	99
Lampiran 6 Hasil Perhitungan <i>Leverage</i>	100
Lampiran 7 Hasil Perhitungan <i>Tax Aggressiveness</i>	101
Lampiran 8 Hasil Output SPSS 21.0.....	102
Lampiran 9 Hasil Output AMOS 21.0	103
Lampiran 10 Laporan Keuangan Perusahaan Sampel	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi dan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya serta kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).Penerimaan negara terbesar berasal dari pajak yaitu sebesar 73,6% dari total penerimaan pemerintah pada tahun 2012 (NK dan APBN, 2014). Oleh karena itu, pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena menjadi tumpuan terbesar dalam APBN.

Wajib pajak dalam hal ini perusahaan berusaha untuk mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar memperoleh laba yang maksimal, hal ini dikarenakan pajak dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha atau strategi untuk menguranginya (Mangoting, 1993). Menurut Landry *et al.*, (2013) pajak merupakan salah satu dari biaya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan dan memiliki dampak langsung terhadap profitabilitas dan *shareholder value*. Pajak yang dianggap sebagai biaya dapat dijadikan celah perusahaan untuk timbulnya tindakan agresivitas pajak. Semakin banyak celah yang digunakan perusahaan maka semakin besar penghematan pajak yang dilakukan perusahaan sehingga perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak (Putri, 2014). Kebijakan manajemen yang dirancang untuk mengoptimalkan

pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak merupakan fitur yang cukup umum dari lingkungan perusahaan diseluruh dunia. Menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009) agresivitas pajak merupakan tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).

Banyaknya kasus kecurangan pajak di Indonesia yang secara tidak langsung telah mengindikasikan perusahaan yang semakin agresif terhadap pajak. Seperti yang terjadi pada PT. Asian Agri Group yang diduga melakukan penggelapan pajak selama empat tahun berturut-turut dari 2002-2005 senilai Rp. 1,259 triliun. Berdasarkan hasil penyelidikan di 14 anak usaha Asian Group yang dilakukan oleh tim dari Direktorat Pajak dari pemeriksaan ditemukan terjadinya penggelapan pajak dengan hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. Kasus lain yang berkaitan terhadap pajak kembali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan bahwa kepatuhan pelaporan pajak pada tahun lalu mencapai 89% menjadi 83% dari seluruh perusahaan asing. Pernyataan tersebut diperkuat karena turunnya penerimaan pajak pada kuartal I 2015. Realisasi pajak hingga 31 maret 2015 hanya Rp 198,23 triliun turun 5,63% dari periode sama tahun lalu (Tribun Network, 23 April 2015).

Berdasarkan dari penjelasan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang berukuran besar seperti perusahaan multinasional atau perusahaan penanaman modal asing yang beroperasi di Indonesia telah banyak

melakukan tindakan agresifitas terhadap pajak. Oleh karena itu, dari maraknya berbagai kasus pajak oleh perusahaan multinasional tersebut telah melatarbelakangi penelitian ini.

Tindakan perusahaan yang semakin agresif terhadap pajak dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Tindakan *tax aggressiveness* dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain akibat masalah yang timbul karena adanya *agency problem*. *Agency problem* timbul karena adanya konflik kepentingan antara *prinsipal* dengan *agent*. Keputusan tindakan *tax aggressiveness* dilakukan oleh manajemen sehingga dikhawatirkan manajemen bersikap oportunistik dengan melakukan tindakan *tax aggressiveness* tanpa memperhatikan keberlangsungan jangka panjang perusahaan seperti yang diharapkan oleh pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010). Untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut dapat diatasi dengan peran *corporate governance* di dalam perusahaan.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai *stakeholder* dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan mampu mengurangi tindakan pajak agresif serta membatasi ruang gerak manajemen sehingga akan sulit untuk melakukan tindakan pajak dan pelaporan keuangan secara bersamaan. Terdapat dua versi laporan keuangan yang digunakan perusahaan setiap tahunnya, yaitu laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum dan laporan keuangan yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mills dalam Ettredge *et al.*,

(2008) menyatakan bahwa beda antara laba menurut akuntansi (*book income*) dan laba/penghasilan menurut pajak (*taxable income*) dapat menunjukkan beda yang besar. Hal ini dikarenakan prinsip akuntansi yang berterima umum menyediakan manajer keleluasaan dalam pemilihan estimasi dan metode akuntansi dibandingkan dengan ketentuan perpajakan yang hanya memberikan lebih sedikit keleluasaan. Berhubungan dengan tindakan yang dilakukan manajemen dalam hal keagresifan terhadap pajak maka dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain akibat masalah yang timbul karena adanya masalah keagenan (*agency problem*).

Pengawasan terhadap manajemen dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan seperti komite audit. Sejak direkomendasikannya *Good Corporate Governance* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000, komite audit (*audit committee*) telah menjadi elemen penting dalam susunan *corporate governance* pada perusahaan *go public* (Swingly dan Sukartha, 2015). Peran komite audit yaitu membantu tugas dewan komisaris dalam melakukan pengawasan, diantaranya melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka penilaian kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Tanggungjawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Pohan (2008) dalam Singly dan Sukartha (2015) menjelaskan bahwa jika jumlah komite audit dalam suatu

perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan BEI yaitu minimal terdapat tiga orang anggota, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak.

Keberadaan komite audit diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal inilah yang dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik, salah satunya adalah meminimalisir beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah melalui pelaporan keuangan yang agresif. Celah tersebut dapat dimanfaatkan manajemen untuk menampilkan *rent extraction* dimana manajer tidak memaksimalkan kepentingan pemilik. Manajemen lebih memilih memuaskan kepentingannya terlebih dahulu seperti mengurangi beban pajak yang dibayarkan ke pemerintah. Untuk mengatasi masalah agensi tersebut perusahaan diharuskan menerapkan *corporate governance* salah satunya seperti pembentukan komite audit dalam perusahaan. Desai dan Dharmapala (2004) memberi bukti bahwasannya hubungan antara suatu determinan terhadap tindakan penghindaran pajak ditentukan oleh indeks yang menunjukkan praktik *corporate governance* perusahaan tersebut.

Benturan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen didasarkan pada *agency theory*, sedangkan keputusan perusahaan mengenai seberapa besar utang yang digunakan perusahaan untuk mendanai aktivitasnya dapat dipengaruhi oleh keberadaan komite audit di suatu perusahaan tersebut. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang perusahaan untuk membiayai

aktivitas operasinya (Darmawan dan Sukartha, 2014). Setiawan (2010) menyebutkan bahwa dari tahun 2000 hingga 2009, tingkat *leverage* perusahaan manufaktur yang *go public* semakin bertambah. Utang yang tinggi akan menimbulkan bunga yang tinggi pula. Bunga tersebut merupakan beban tetap yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak, sehingga semakin besar utang perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Pahphan (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketika perusahaan dihadapkan pada keputusan pendanaan melalui hutang, pemegang saham cenderung menghindari hal tersebut karena risiko yang akan ditanggung, sedangkan manajemen yang bertugas sebagai profesional akan menyukai hal tersebut karena adanya ketersediaan dana dan pihak manajemen akan dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi yang menguntungkan manajemen akan adanya insentif yang didapatkan tanpa memikirkan risiko yang pada dasarnya akan ditanggung perusahaan. Choi (2003) dalam Tirsono (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih banyak mengajukan utang akan mendapatkan keuntungan pajak dari pembebanan bunga atas utang tersebut, sehingga untuk menekan tindakan oportunistik manajemen perusahaan dapat mengambil salah satu solusi yaitu dengan membentuk komite audit sebagai monitoring aktivitas manajemen perusahaan yang kemudian pihak manajemen dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan pendanaan perusahaan dan mengelola hutang perusahaan tidak akan terlalu tinggi karena aktivitas manajemen sepenuhnya telah diawasi oleh komite audit.

Zhank *et al.*, (2007) menjelaskan bahwa komite audit memiliki peran penting untuk memantau pengendalian internal dan untuk memahami berbagai masalah keuangan dan operasional yang dapat timbul. (Tifani, 2010) menjelaskan tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance*. Dari pernyataan tersebut maka keberadaan komite audit dirasa efektif jika keberadaannya mampu menjadi penengah adanya masalah keagenan yang timbul antara pemilik perusahaan dan manajemen serta mampu mengontrol kinerja manajemen yang dalam hal ini adalah mengenai pengambilan keputusan pendanaan (*leverage*) melalui hutang untuk kegiatan operasional perusahaan agar tidak terlalu tinggi. Karena hutang yang terlalu tinggi akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) yang berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup perusahaan dimasa mendatang.

Seiring dengan menurunnya *leverage* maka tindakan *tax aggressiveness* akan semakin rendah juga. Oleh karena itu, diduga bahwa komite audit dapat mempengaruhi tinggi rendahnya *leverage*, dengan demikian secara tidak langsung dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax aggressiveness* melalui beban bunga utang. Sehingga keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan dapat menurunkan *leverage* perusahaan dengan mengamati aktivitas

yang dilakukan manajemen. Dengan demikian *leverage* diduga dapat memediasi hubungan komite audit terhadap *tax aggressiveness*.

Selain komite audit dan *leverage*, *tax aggressiveness* juga bisa muncul dari berbagai faktor lain. Salah satunya adalah *corporate social responsibility* (CSR). CSR merupakan bentuk kesungguhan perusahaan untuk mengurangi dampak negatif serta menambah dampak positif perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkesinambungan (Warhust, 2010). CSR bagi perusahaan adalah pengeluaran, begitu pula dengan pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini dianggap oleh perusahaan sebagai pengeluaran ganda bagi perusahaan dan menjadikan hal ini sebagai kerugian. Namun jika perusahaan tidak melakukan tanggung jawab sosial seperti yang diharapkan oleh masyarakat maka akan berdampak negatif dimata masyarakat. Pengungkapan CSR diperlukan sebagaimana wujud timbal balik perusahaan terhadap masyarakat, karena perusahaan dalam kegiatan operasionalnya tidak lepas dari lingkungan dan dukungan dari masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat (Oktaviana dan Rohman, 2014).

Menurut Erle dan Schon (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) tindakan agresivitas pajak dianggap sebagai aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Yoehana (2013) dalam penelitiannya menjelaskan semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya CSR maka perusahaan semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat pada umumnya. Berdasarkan teori legitimasi dijelaskan bahwa perusahaan terus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka

melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma masyarakat atau berusaha melegitimasi tindakannya agar dapat diterima masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dari kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak dengan penuh kesadaran dan tidak berupaya untuk melakukan aktifitas agresivitas pajak yang dapat merugikan banyak pihak.

Avi-Yonah (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa pajak perusahaan hanya dapat dikaitkan dengan CSR jika pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan memiliki implikasi untuk masyarakat luas. Apabila pembayaran pajak hanyadianggap sebagai transaksi bisnis dan salah satu biaya perusahaan, mungkin tujuan perusahaan tersebut adalah untuk meminimalkan jumlah pajak terutang sebanyak mungkin. Christensen dan Murphy (2004), Ostas (2004) Rose (2007) dalam Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan denganmengambil sikap pasif terhadap perpajakan, perusahaan dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat serta dapat mempertahankan kedudukan yang baik dengan otoritas pajak dengan cara mematuhi dan semangat dalam mengikuti hukum perpajakan yang berlaku. Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan perusahaan yang terlibat dalam kebijakan agresivitas pajak merupakan perusahaan yang secara sosial tidak bertanggung jawab. Keputusan perusahaan dalam berkeinginan untuk mengurangi kewajibannya secara sah dipengaruhi oleh sikapnya terhadap CSR sebagai tambahan pertimbangan legalitas dan etika yang lebih mendasar.

Faktor lain yang dianggap berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* adalah ukuran perusahaan (*size firm*). Dewi dan Jati (2014) berpendapat bahwa ciri khas

suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaan dan *multinational company*. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar total asset maka dapat diartikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Rusydi (2014) dalam penelitiannya menjelaskan beberapa kasus besar *aggressive tax avoidance* yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diantaranya kasus Asian Agri, Bumi Resources, Adaro, Indosat, Indofood, Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Airfast Indonesia (anak perusahaan PT Freeport Mc Moran). Fakta ini semakin menunjukkan hubungan *aggressive tax avoidance* dengan perusahaan multinasional yang sebagian besar memiliki nilai aset (*firm size*) yang besar. Dewi dan Jati (2014) menjelaskan perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan perencanaan pajak yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena perusahaan tersebut dapat melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada dilain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak lebih rendah dibanding negara lainnya. Perusahaan berukuran besar dapat membiayai perpajakannya secara khusus oleh profesional perusahaan karena perusahaan berukuran besar memiliki sumber daya yang ahli yang mengetahui peraturan perpajakan secara rinci sehingga dapat melakukan perencanaan pajak yang baik. Maka ukuran perusahaan dianggap memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian mengenai komite audit terhadap *tax aggressiveness* telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti terdahulu. Ariyani (2014) menguji independensi komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit,

terhadap tindakan agresivitas pajak yang menunjukkan bahwa kompetensi komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi (2014) yang menemukan hasil bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.

Selain itu terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan tentang pengaruh *leverage* terhadap *tax aggressiveness*. Hartadinata dan Tjaraka (2013) menunjukkan bahwa *leverage* dengan keagresifan dalam kebijakan perpajakan menunjukkan hasil pengaruh positif. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Ariyani (2014) yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian mengenai pengaruh CSR terhadap *tax aggressiveness* masih jarang dilakukan di Indonesia. Ageta (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Bertentangan dengan hasil penelitian Kurniati (2012) yang menyatakan bahwa aktivitas CSR tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2013) adalah perusahaan yang telah terbukti melakukan agresivitas pajak dapat bertindak sesuai dengan teori legitimasi dengan cara melakukan pengungkapan informasi CSR tambahan.

Sementara penelitian Hartadinata dan Tjaraka (2013) yang mengkaitkan ukuran perusahaan dengan *tax aggressiveness* menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan dengan *tax aggressiveness* berpengaruh negatif. Berbeda dengan hasil penelitian Sabrina dan Soepriyanto (2013) yang menyebutkan bahwa ukuran

perusahaan yang diwakili logaritma total asset tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif.

Berdasarkan latar belakang, hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten (*research gap*), serta maraknya berbagai kasus pajak dan praktik agresifitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan PMA atau perusahaan multinasional maka memotivasi peneliti untuk mengambil judul penelitian “Analisis Determinan *Tax Aggressiveness* pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013”.

Perusahaan multinasional yang dimaksud adalah perusahaan yang berstatus Pemilik Modal Asing (PMA) yang secara berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Periode penelitian dimulai tahun 2010 dikarenakan penggunaan data sebelum tahun 2010 cenderung menghasilkan perbedaan terhadap hasil perhitungan *tax aggressiveness* akibat perubahan tarif pajak dari yang sebelumnya sebesar 28% pada tahun 2009 menjadi 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *leverage*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?

5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*?
6. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* melalui *leverage*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap *leverage*.
2. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap *tax aggressiveness*.
3. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax aggressiveness*.
4. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax aggressiveness*.
5. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.
6. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap *tax aggressiveness* melalui *leverage*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bagi bidang akademik, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait dengan *tax aggressiveness* atau dapat digunakan untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depannya ingin melakukan penelitian yang sejenis.
2. Bagi perusahaan, memberikan kesadaran kepada pemilik perusahaan agar mau membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan, karena sikap perusahaan memberikan dampak secara luas terhadap negara.
3. Bagi investor, memberikan masukan kepada investor dalam menilai dan mengevaluasi suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.
4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, memberikan informasi dan referensi penting selaku pembuat kebijakan perpajakan bahwa tindakan *tax aggressiveness* yang dilakukan perusahaan memberikan dampak dan risiko yang besar terhadap negara.

BAB II

TELAAH TEORI

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Prinsip utama *agency theory* adalah menjelaskan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu pemilik atau investor dengan pihak yang diberikan wewenang (*agents*) yaitu manajer dalam bentuk kontrak kerja. Teori ini menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah.

Eisenhardt (1989) menjelaskan adanya asumsi informasi dalam *agency theory* menekankan bahwa informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan. Konflik kepentingan akan semakin meningkat karena pemegang saham tidak dapat memonitor aktivitas manajer untuk memastikan bahwa manajer bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Watts dan Zimmerman, 1986). Dalam hal ini pemegang saham tidak memiliki cukup informasi tentang kinerja manajer, namun disisi lain manajer memiliki lebih banyak informasi mengenai lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki pemegang saham dan manajer. Kondisi seperti ini dikenal dengan asimetri informasi.

Pihak manajemen yang memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan akan mendapat dorongan untuk melakukan kecurangan dengan

memaksimalkan kepentingan pribadinya. Manajemen diasumsikan akan memilih pencatatan akuntansi yang sesuai dengan tujuannya memaksimalkan kepentingannya dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, sehingga akan membuat para pemilik perusahaan menjadi tidak percaya dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Timbulnya berbagai masalah akan menambah konflik antara pemegang saham dengan tim manajemen yang membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Konflik ini dikenal dengan nama *agency problem* (Kim, Nofsinger, dan Mohr, 2010).

Menurut Gitman (2007) untuk mengatasi *agency problem* dapat dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut:

1. *Market forces*, merupakan pemegang saham yang memiliki saham mayoritas, seperti investor institusional yang biasanya berupa perusahaan asuransi jiwa, mutual fund, perusahaan dana pensiun. Melalui hak suara mayoritas maka diyakini akan dapat mengatasi masalah agensi. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberi tekanan kepada manajer untuk bekerja dengan lebih baik ataupun mengganti manajemen yang dianggap tidak dapat memenuhi kesejahteraan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mengancam dengan mengatakan perusahaan lain akan melakukan *take over* yang dapat merestrukturisasi manajemen. Tujuan dari hal tersebut adalah menimbulkan motivasi bagi manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

2. *Agency cost*, merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurangi *agency problem* sekaligus untuk pemenuhan kesejahteraan para pemegang saham. Biaya yang dikeluarkan antara lain, berasal dari biaya insentif yang akan diberikan kepada manajer untuk memaksimalkan harga saham. Selain itu, biaya keagenan juga timbul karena adanya pengawasan setiap tindakan manajer, dimana sistem pengawasan dikenal dengan *corporate governance*.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebutkan dengan konflik keagenan sehingga dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari :

1. *Monitoring cost* merupakan suatu biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi perilaku manajer dalam mengelola perusahaan, termasuk juga usaha untuk mengendalikan perilaku manajer melalui pembatasannya anggaran dan kebijakan kompensasi.
2. *Bonding cost* merupakan suatu biaya yang dikeluarkan oleh manajer untuk menjamin bahwa manajer tidak akan bertindak yang akan merugikan pemilik.
3. *Residual cost* merupakan penurunan tingkat kesejahteraan, baik bagi pemilik maupun manajer setelah adanya hubungan keagenan.

2.2. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi telah digunakan dalam kajian akuntansi untuk mengembangkan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Definisi teori legitimasi menurut Gray, Kouhy, dan Lavers (1995) adalah sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada *society*, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat. Legitimasi perusahaan merupakan arah implikasi orientasi pertanggungjawaban perusahaan yang lebih menitik beratkan pada *stakeholders persepektive* (masyarakat dalam arti luas). *Social disclosure* dapat dijadikan satu representatif keberpihakan sosial (tanggung jawab sosial) perusahaan terhadap pihak eksternal. Teori legitimasi dapat dijadikan salah satu pijakan bagaimana seharusnya perusahaan merumuskan kebijakan agar tetap memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari *stakeholders*. Terlebih dalam hal kebijakan pengungkapan serta kebijakan keberpihakan sosial.

Kuznetsov dan Kuznetsova (2008) menyatakan bawa konsep teori legitimasi yaitu menekankan adanya suatu kontrak sosial yang implisit dimana perusahaan bertanggung jawab terhadap harapan atau tuntutan masyarakat. Terlebih lagi legitimasi juga penting untuk menjamin arus modal masuk, tenaga kerja, dan kebutuhan pelanggan untuk kelangsungan hidup perusahaan (Pleffer dan Salanick, 1978; Neu *et al.*, 1998; dikutip dari Michelon dan Parbonetti, 2010). Legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup perusahaan (*going concern*). Secara spesifik, dianggap bahwa kelangsungan hidup

suatu organisasi akan terancam jika masyarakat mempersepsikan bahwa organisasi telah melanggar kontrak sosial (Deegan 2002 dalam Cuganesan, Ward, dan Guthrie, 2007).

Cheers (2011) menjelaskan bahwa perusahaan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya harus mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Untuk memperoleh legitimasi dari investor, perusahaan senantiasa meningkatkan return saham bagi investor. Untuk memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan meningkatkan kemampuannya mengembalikan utang. Untuk memperoleh legitimasi dari konsumen, perusahaan senantiasa meningkatkan mutu produk dan layanan. Untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah, perusahaan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan melakukan aktivitas pertanggungjawaban sosial. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perusahaan kecil.

2.3. Tax Aggressiveness

Tax aggressiveness merupakan tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Franket *al.*, 2009). Definisi lain *tax aggressiveness* menurut (Slemrod, 2004) merupakan aktivitas yang spesifik yang mencakup transaksi-transaksi dimana tujuannya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Balakrishnan,

et al., (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dapat ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Selanjutnya Chen, Chen, Cheng, dan Shelvlin (2010) mengungkapkan perusahaan diasumsikan akan mempunyai preferensi agar manajemen perusahaan menjadi lebih agresif dalam perpajakan. Walaupun tindakan pajak yang diambil tidak menyalahi peraturan yang ada, tetapi perusahaan semakin mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan yang ada maka tindakan tersebut dinilai semakin agresif.

Tujuan utama dari aktivitas *tax aggressiveness* adalah dengan membuat beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah, karena perusahaan menganggap pembayaran pajak penghasilan sebagai sebuah tambahan beban biaya yang sangat besar atau transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan, oleh karena itu perusahaan diprediksi melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Tingkat agresivitas pajak pada umumnya dipengaruhi oleh faktor manfaat dan resiko yang akan ditimbulkannya. Chen *et al.*, (2010) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketika suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan tindakan *tax aggressiveness* seorang manajer atau pembuat keputusan akan membuat perhitungan manfaat dan kerugian dengan keputusannya. Tindakan *tax aggressiveness* dapat memberikan *marginal benefit* dan *marginal cost*. *Marginal benefit* yang mungkin didapat adalah:

1. Manfaat efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah, sehingga manfaat kas untuk pemilik atau pemegang saham menjadi semakin luas.
2. Manfaat langsung atau tidak langsung bagi manajer untuk memperoleh kompensasi dari pemilik dan pemegang saham dari tindakan *tax aggressiveness* yang dilakukan.
3. Manfaat kesempatan bagi manajer untuk menampilkan *rent extraction*. *Rent extraction* adalah tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik, tindakan ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, mengambil sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, ataupun melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Disisi lain *marginal cost* saat melakukan tindakan *tax aggressiveness* yaitu kemungkinan untuk memperoleh sanksi atau penalti dari pihak fiskus pajak dan menurunnya harga saham perusahaan. Kemungkinan penurunan harga saham disebabkan adanya anggapan pemegang saham bahwa tindakan *tax aggressiveness* dijalankan oleh manajer untuk tindakan *rent extraction* yang dapat merugikan pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2006).

Pengukuran keagresifan suatu perusahaan dalam pembayaran pajak sebenarnya cukup sulit untuk dilakukan dikarenakan data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPh) yang sulit diperoleh karena sifatnya yang rahasia, maka peneliti melakukan pendekatan untuk menaksir besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Oleh karena itu untuk

mengukur tindakan *tax aggressiveness* perusahaan penelitian mengadopsi pendekatan tidak langsung untuk mengetahui seberapa agresifkah perusahaan dalam melakukan pembayaran pajaknya.

Terdapat berbagai macam proksi untuk mengukur *tax aggressiveness*. Proksi dalam penelitian ini peneliti mengukur *tax aggressiveness* dengan *Book Tax Gap* (BTG). Pengukuran *tax aggressiveness* yang peneliti gunakan yaitu dengan menghitung perbedaan antara laba sebelum pajak dengan laba kena pajak (*gap between financial and taxable income*). Laba sebelum pajak merupakan laba yang dilaporkan kepada pemegang saham (investor) yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laba kena pajak merupakan laba yang disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan. Perbedaan ini dikenal dengan *Book Tax Gap* (BTG) (Desai dan Dharmapala, 2007 dalam Prakosa, 2014).

Beberapa peneliti di luar negeri seperti Bovi (2005); Chai dan Liu (2010); Kim, Li, dan Li* (2010); Friese, Link dan Mayer (2006); Chen dan Chu (2010); Desai dan Dharmapala (2007); Crocker dan Slemrod (2003) dan peneliti di Indonesia seperti Fadhilah (2014); Annisa dan Kurniasih (2012); Santoso (2014) telah menggunakan BTG untuk mengukur *tax aggressiveness*. BTG digunakan karena dianggap mampu merefleksikan kesenjangan atau perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan dalam laporan laba rugi menurut peraturan akuntansi dengan laba fiskal atau laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi untuk kepentingan perpajakan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan negara yang bersangkutan (Bovi, 2005). Pengukuran tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi tindakan *tax aggressiveness* perusahaan dan dapat mengetahui

apakah suatu perusahaan melakukan suatu tindakan *tax aggressiveness* atau tidak. Tang (2006) dalam Persada dan Martani (2010) menjelaskan jika perusahaan memilih melakukan metode akuntansi agresif (kenaikan laba) dan melakukan perpajakan agresif (mengurangi pembayaran pajak) maka *book tax gap* perusahaan akan berbeda dengan perusahaan yang tidak memiliki insentif. *Book Tax Gap* terjadi ketika laba sebelum pajak lebih besar dibandingkan penghasilan kena pajak (*positive book tax gap*) atau sebaliknya pendapatan sebelum pajak lebih kecil dibandingkan laba kena pajak (*negative book tax gap*) (Revsine, 2001 dalam Persada dan Martani, 2010).

2.4. Komite Audit

Komite audit sering kali disebut sebagai salah satu keberhasilan dari *corporate governance*, bahkan keberadaan dari komite audit telah diatur secara legal hampir di seluruh negara. Di Indonesia sendiri komite audit telah diatur melalui Peraturan BAPEPAM Nomor KEP-29/PM/2004 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, jumlah komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten. Salah satu anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. Persyaratan tersebut dimaksudkan agar pengendalian internal perusahaan menjadi lebih akurat.

Wulandari (2011) menjelaskan *agency theory* telah memprediksi bahwa pembentukan komite audit merupakan cara untuk menyelesaikan *agency problem*. Hal ini dikarenakan peran utama dan tanggungjawab komite audit yaitu: mengawasi integritas laporan keuangan perusahaan; melakukan review atas sistem kontrol keuangan internal perusahaan; mengawasi dan melakukan review atas efektivitas fungsi audit internal perusahaan; membuat rekomendasi kepada dewan dalam hubungan dengan pertemuan dengan auditor eksternal dan menyetujui remunerasi dan perjanjian dengan auditor eksternal; mengawasi dan melakukan review atas independensi, efektivitas, dan objektivitas auditor eksternal; serta mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dalam perjanjian dengan eksternal auditor untuk memenuhi jasa non-audit (Smith Report dalam Solomon, 2007).

Stuart dan Zaman (2007) menyatakan keberadaan komite audit adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham melalui tanggung jawab pengawasan dibidang pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan aktivitas audit eksternal. Efektivitas komite audit dalam menjalankan fungsi dan perannya sangat dipengaruhi oleh karakteristiknya. Karakteristik komite audit ditunjukkan dengan jumlah anggota atau ukuran komite audit, keahlian komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi pertemuan. Peran dan tanggungjawab komite audit telah dituangkan dalam *Charter Komite Audit* yang secara umum dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu *financial reporting*, *corporate governance*, dan *risk and control management*. Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap penerapan prinsip-prinsip

GCG yang pada akhirnya dapat membatasi atau bahkan mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan.

2.5. Corporate Social Responsibility

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Yoehana (2013) menjelaskan bahwa sekarang ini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut (*Triple bottom line*). Sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (Siregar, 2007). Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan perwujudan komitmen yang dibangun oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Susiloadi, 2008). CSR diterapkan di perusahaan agar perusahaan lebih unggul dari pesaing dalam hal mendapatkan keuntungan. Satu perusahaan yang telah berhasil menerapkan kebijakan CSR, perusahaan pesaing terpaksa untuk terlibat juga dalam aktivitas CSR. Alasannya karena perusahaan pesaing tidak menerapkan CSR maka perusahaan pesaing tersebut akan terancam kehilangan loyalitas konsumennya.

Penerapan CSR dalam suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan perhatiannya terhadap lingkungan dan kondisi kerja, hubungan perusahaan

dengan karyawan, hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, dan citra perusahaan di mata publik menjadi baik. Adanya kegiatan operasi perusahaan tersebut maka perusahaan harus memberikan timbal balik antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya karena adanya dampak-dampak sosial dari kegiatan operasi perusahaan pada lingkungan. Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan.

2.6. Ukuran Perusahaan

Definisi ukuran perusahaan menurut Hendriksen dan Eldon (2000) merupakan keseluruhan dari aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat dilihat dari sisi kiri neraca. Salah satu yang menjadi tolak ukur besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Muliati (2011) menjelaskan skala dimana besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara seperti log total aset, log total aktiva, log total penjualan, kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Ukuran perusahaan yang besar dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek *cash flow* dimasa yang akan datang, sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta

efektifitas peran pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum (Nuryaman, 2008).

Telah banyak penelitian dilakukan untuk memeriksa hubungan antara besarnya perusahaan dengan pajak, karena pada umumnya perusahaan yang besar maka setoran pajaknya juga besar. Ristiyadi (2004) menyatakan bahwa perusahaan yang besar melakukan transfer kekayaan kepada pemerintah relatif lebih besar daripada perusahaan yang lebih kecil. Semakin besar perusahaan akan lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak yang baik. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan perusahaan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif terhadap pajak.

2.7. *Leverage*

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, biaya bunga pinjaman dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga pembayaran bunga dari pendanaan perusahaan yang melalui utang dapat membuat tarif pajak efektif perusahaan menjadi rendah. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi (Endrian, 2010). Rasio *leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran semua hutang, baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek, atau kenaikan bila mengalami likuidasi. *Leverage* berkaitan

dengan bagaimana perusahaan didanai, lebih banyak menggunakan utang atau modal yang berasal dari pemegang saham.

Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Yulfaida, 2012). Ketika sebuah perusahaan berekspansi, perusahaan akan membutuhkan modal, dan modal tersebut dapat berasal dari hutang maupun ekuitas. Hutang memiliki dua keunggulan penting. Pertama, bunga yang dibayarkan dapat menjadi pengurang pajak yang selanjutnya akan menurunkan biaya efektif hutang tersebut. Kedua, kreditur akan mendapatkan pengembalian dalam jumlah tetap sehingga pemegang saham tidak harus membagi keuntungannya jika bisnis berjalan dengan sangat baik (Septiadi, 2010).

Brigham dan Houston, 2006 dalam Septiadi (2010) menyebutkan bahwa hutang juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

1. Semakin tinggi rasio hutang, maka perusahaan tersebut akan semakin berisiko, sehingga semakin tinggi pula biaya baik dari hutang maupun ekuitasnya.
2. Apabila sebuah perusahaan mengalami masa-masa sulit dan laba operasi tidak cukup untuk menutupi beban bunga, para pemegang sahamnya harus menutupi kekurangan tersebut, dan jika mereka tidak dapat melakukannya, maka akan terjadi kebangkrutan.

Akibat utama penggunaan dana pinjaman (utang jangka panjang) menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga atas pembayaran utang. Peraturan perpajakan yaitu pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Pembebanan bunga utang yang bersifat *deductible* tersebut dapat dipergunakan untuk mengurangi laba kena pajak sehingga penggunaan utang akan memberikan manfaat pajak bagi perusahaan. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

2.8. Penelitian Terdahulu

Lanis dan Richardson (2012) meneliti tentang *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis* pada perusahaan publik Australia yang terdaftar dalam *Aspect-Huntley Financial Database* periode tahun 2008-2009. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak perusahaan, sedangkan variabel independen adalah CSR. Selain itu penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol antara lain proporsi anggota dewan direksi independen, *trouble*, umur perusahaan, struktur kepemilikan saham oleh manajemen, *CEO tenure*, *CEO duality*, kepemilikan saham minoritas, ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, *research and development intensity*, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan sektor industri. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan.

Suyanto dan Supramono (2012) meneliti tentang Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan *leverage* perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Kemudian manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Yoehana (2013) meneliti tentang analisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. Variabel dependen penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur menggunakan *effective tax rates* dan *book tax deffferences*, sedangkan variabel independen *corporate social responsibility*. Selain itu penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol profiabilitas, *leverage*, *inventory turnover*, dan *capital intensity*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya.

Hartadinata dan Tjaraka (2013) meneliti tentang Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Aggressiveness* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010. Penelitian ini menggunakan analisis regresi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kepemilikan manajerial maka semakin rendah tingkat keagresifan pajak. Semakin tinggi proporsi utang

maka ada kecenderungan perusahaan semakin agresif dalam kebijakan perpajakannya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tidak agresif dalam kebijakan perpajakannya.

Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi (2014) meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Tindakan Pajak Agresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.

Ridha dan Martani (2014) meneliti tentang Analisis terhadap Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa agresivitas pelaporan keuangan memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap agresivitas pajak oleh perusahaan. Agresivitas pajak memiliki hubungan positif terhadap agresivitas pelaporan keuangan. Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan keluarga tidak terdapat hubungan signifikan terhadap agresivitas pelaporan keuangan. Tata kelola (dewan direksi dan komisaris, komite audit, serta auditor internal) perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tata kelola perusahaan tidak terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pelaporan keuangan.

Fransisca (2014) meneliti tentang Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Tidak terdapat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Richardson *et al.*,(2013) meneliti tentang pengaruh karakteristik pengawasan *board of director* terhadap *tax aggressiveness*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menetapkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, menggunakan jasa audit Big 4 dengan proporsi jasa audit lebih besar daripada jasa non audit, dan memiliki lebih banyak komite audit independen cenderung lebih tidak agresif terhadap pajak.

Ahmed Sultan Bin Sariman, Azwadi Ali, Mohd Nazli Mohd Nor (2013) meneliti tentang *The Mediating Effects of Financial Reporting Quality on Audit Committee Quality and Capital Structure in Omani Firms*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas komite audit berpengaruh signifikan terhadap *leverage* perusahaan. Nilai pasar *leverage* perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas komite audit. Kualitas dewan direksi berpengaruh signifikan negatif dengan nilai pasar *leverage* perusahaan. Kualitas komite audit dan kualitas dewan direksi berpengaruh tidak signifikan dengan nilai buku *leverage* perusahaan.

Fransisca Bulan, Etna Nur Afri Yuyetta (2014) meneliti tentang Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Capital Structure* Pada Perusahaan Manufaktur

yang Terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *debt ratio*, remunerasi direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *debt ratio*, komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *debt ratio*, rapat direksi berpengaruh positif terhadap *debt ratio*.

Berikut ini ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dilihat dalam Tabel 2.1.:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Roman Lanis dan Grant Richardson (2011)	<i>Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis</i>	Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan.
2.	Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012)	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, dan komposisi saham tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.
3.	Maretta Yoehana (2013)	Analisis Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak	Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya.
4.	Okta S. Hartadinata dan Heru Tjaraka	Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang,	Semakin tinggi rasio kepemilikan manajerial maka semakin rendah tingkat keagresifan pajak. Semakin tinggi proporsi utang maka ada

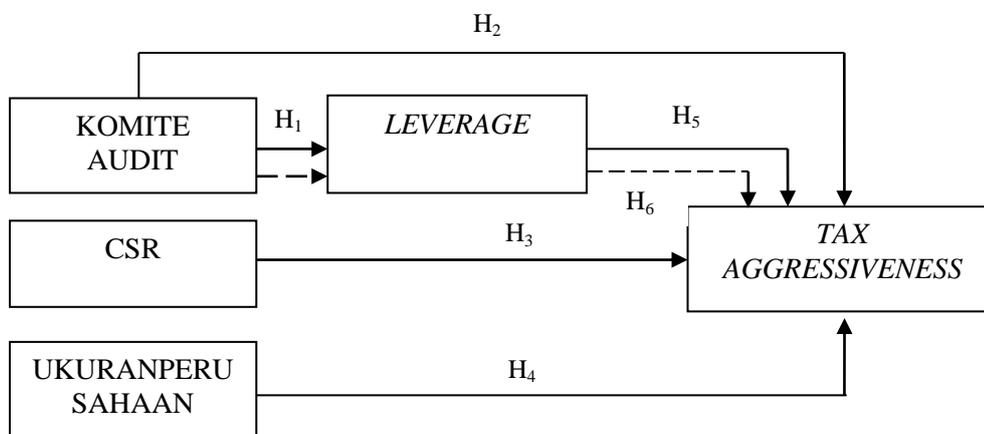
No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	(2013)	dan Ukuran Perusahan Terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010	kecenderungan perusahaan semakin agresif dalam kebijakan perpajakannya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tidak agresif dalam kebijakan perpajakannya.
5.	Rina Winarsih, Prasetyono, Muhammad Syam Kusufi (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Tindakan Pajak Agresif	Semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.
6.	Muhammad Ridha dan Dwi Martani (2014)	Analisis terhadap Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia	Agresivitas pelaporan keuangan memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap agresivitas pajak oleh perusahaan. Agresivitas pajak memiliki hubungan positif terhadap agresivitas pelaporan keuangan. Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan keluarga tidak terdapat hubungan signifikan terhadap agresivitas pelaporan keuangan. Tata kelola perusahaan (dewan direksi dan komisaris, komite audit, serta auditor internal) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tata kelola perusahaan tidak terbukti berpengaruh terhadap agresivitas pelaporan keuangan.
7.	Maria Fransisca (2014)	Pengaruh Likuiditas dan <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa	Tidak terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Tidak terdapat pengaruh <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak. Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Efek Indonesia Periode 2009-2012	
8.	Richardson <i>et al.</i> , (2013)	Pengaruh Karakteristik Pengawasan <i>Board of Director</i> terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>	Perusahaan yang menetapkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, menggunakan jasa audit Big 4 dengan proporsi jasa audit lebih besar daripada jasa non audit, dan memiliki lebih banyak komite audit independen cenderung lebih tidak agresif terhadap pajak.
9.	Ahmed Sultan Bin Sariman, Azwadi Ali, Mohd Nazli Mohd Nor (2013)	<i>The Mediating Effects of Financial Reporting Quality on Audit Committee Quality and Capital Structure in Omani Firms</i>	Kualitas komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>leverage</i> perusahaan. Nilai pasar <i>leverage</i> perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas komite audit. Kualitas dewan direksi berpengaruh signifikan negatif dengan nilai pasar <i>leverage</i> perusahaan. Kualitas komite audit dan kualitas dewan direksi berpengaruh tidak signifikan dengan nilai buku <i>leverage</i> perusahaan.
10.	Fransisca Bulan, Etna Nur Afri Yuyetta (2014)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Capital Structure</i>	Ukuran direksi, remunerasi direksi, komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>debt ratio</i> . Rapat direksi berpengaruh positif terhadap <i>debt ratio</i> .

2.9. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu pada bab sebelumnya maka dibuat kerangka pemikiran penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran Teoritis



Kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwa variabel *endogeneous* yaitu *tax aggressiveness*, variabel *exogeneous* meliputi komite audit, *Corporate Social Responsibility*, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel *intervening*-nya yaitu *leverage*.

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Komite Audit terhadap *Leverage*

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, audit eksternal perusahaan, dan mengamati sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi sifat *oportunistic* manajemen. Seperti yang dijelaskan dalam *agency theory* Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengolahan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap konflik kepentingan karena konsekuensi dari pemisahan fungsi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya *agency problem* karena adanya perbedaan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Konflik keagenan timbul salah satunya disebabkan oleh masalah keputusan

pendanaan. Keputusan pendanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai keputusan manajemen dalam menentukan sumber-sumber pendanaan dari modal internal, yakni: modal ditahan atau dari modal eksternal, modal sendiri, dan atau melalui hutang (Waluyo et al. 2002 dalam Murni dan Andriana 2007). Keputusan yang diambil manajer cenderung bertindak melindungi dan memenuhi kepentingannya terlebih dahulu daripada memenuhi kepentingan pemilik seperti melakukan ekspansi untuk meningkatkan status dan gaji sehingga sudah tidak lagi berdasarkan pada tujuan perusahaan (memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham).

Pakphan (2012) menjelaskan bahwa ketika perusahaan dihadapkan pada keputusan pendanaan melalui hutang, pemegang saham cenderung untuk menghindari hal tersebut karena risiko yang akan ditanggung. Sedangkan pihak manajemen yang bertugas sebagai profesional akan menyukai hal tersebut, karena adanya ketersediaan dana dan pihak manajemen akan dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi yang menguntungkan manajemen akan adanya insentif yang didapat tanpa memikirkan risiko yang pada dasarnya ditanggung perusahaan.

Keadaan tersebut menyebabkan perlunya suatu sistem mekanisme pengawasan yang pada akhirnya menimbulkan biaya yang disebut *agency cost*. Untuk meminimalisir *agency cost* yang mungkin muncul di dalam perusahaan, maka perusahaan dapat mengambil salah satu solusi yaitu dengan membentuk komite audit di dalam perusahaan. Keberadaan komite audit sebagai pengawasan akan semakin efektif, agar manajemen semakin berhati-hati dalam memperoleh pinjaman, sebab jumlah utang yang semakin meningkat menimbulkan *financial*

distress. Terjadinya *financial distress* akan mengakibatkan nilai perusahaan akan mengalami penurunan sehingga mengurangi kemakmuran pemiliknya. Keberadaan komite audit akan mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang lebih akurat dan akan menurunkan *default risk*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *leverage*

2.10.2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Aggressiveness*

Foker (1992) dalam Hanum (2013) menyatakan bahwa komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Komite audit adalah komite tambahan yang memiliki tugas membantu dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004. Keberadaan komite audit dapat membantu dewan komisaris untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi dengan melakukan pengawasan kepada manajemen. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM yaitu komite audit minimal berjumlah 3 orang (dengan diketuai oleh seorang dewan komisaris independen yang menjabat sebagai ketua komite audit). Semakin banyak pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif.

Jika dikaitkan antara perilaku manajemen dalam menyusun laporan keuangan dengan pajak, perusahaan akan cenderung melakukan penekanan terhadap pajak terhutang yang harus mereka bayar. Semakin tinggi keberadaan

komite audit akan berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance* di dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan tindakan *tax aggressiveness* yang dilakukan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggungjawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan. Agar keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan dapat berjalan dengan baik maka segala perilaku atau tindakan yang menyimpang berhubungan dengan laporan keuangan yang dilakukan manajemen bisa dihindari oleh perusahaan, sehingga keberadaan komite audit diharapkan mampu meminimalisi dan meminimalkan adanya tindakan *tax aggressiveness* perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*

2.10.3. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Aggressiveness*

Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak berarti telah mengurangi pajak yang dibayarkan kepada negara sehingga berdampak secara langsung pada penerimaan negara yang lebih sedikit dari seharusnya (Jessica dan Toly, 2014). Sehingga dapat dikatakan perusahaan tidak bertanggungjawab secara sosial. Sesuai peraturan perundang-undangan perusahaan wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dengan melaporkan kegiatan CSR-nya. Hal ini didukung dengan *legitimasi theory* yang menjelaskan bahwa sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu

dan kelompok masyarakat. Sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat. Salah satu bukti bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan harapan masyarakat dan untuk mendapatkan reputasi baik dari masyarakat maka dalam hal membayar pajak perusahaan dengan penuh kesadaran dan tidak berupaya untuk melakukan aktifitas *tax aggressiveness*.

William (2007) dalam Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa sulit untuk membedakan tindakan CSR yang dilakukan perusahaan benar-benar dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban perusahaan menurut peraturan undang-undang atau karena perusahaan mempunyai motif lain dalam mengungkapkan CSR-nya yang dalam penelitian ini adalah motif melakukan agresivitas pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak agresif terhadap pajak. Hal ini karena apabila perusahaan yang menjalankan CSR bertindak agresif terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan tersebut kehilangan reputasi di mata masyarakat dan akan menghilangkan dampak positif yang terkait dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₃ : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*

2.10.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Aggressiveness*

Perusahaan yang termasuk dalam skala besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Siegfried

(1972) dalam penelitian Lanis dan Richardson (2007) menyatakan bahwa perusahaan besar akan lebih agresif terhadap pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang optimal, dikarenakan perusahaan besar menginginkan laba dan kekuatan politik yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil sehingga mampu mengurangi beban pajak yang dikenakan. Rego (2003) dalam Novia (2014) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dalam ukuran besar dapat mencapai skala ekonomi melalui perencanaan pajak dan memiliki insentif dan sumber daya yang tersedia untuk mengurangi jumlah pajak terutang.

Persada dan Martani (2010) melakukan penelitian yang menghubungkan antara ukuran perusahaan dengan *Book Tax Gap*. Hasilnya adalah ukuran perusahaan menunjukkan nilai yang signifikan terhadap *Book Tax Gap*. Semakin besar ukuran perusahaan akan semakin baik perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan tindakan *tax aggressiveness* agar mencapai penghematan pajak yang optimal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*

2.10.5. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Aggressiveness*

Jessica dan Toly (2014) menjelaskan *leverage* sebagai rasio yang timbul apabila dalam kegiatan operasionalnya perusahaan menggunakan dana pinjaman atau menggunakan dana yang memiliki beban bunga. Apabila dikaitkan dengan pajak, perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang dari kreditur untuk

memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, biaya bunga pinjaman dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga pembayaran bunga dari pendanaan perusahaan yang melalui utang dapat membuat tarif pajak efektif perusahaan menjadi rendah. Bunga merupakan biaya usaha yang dapat dikurangkan dalam proses perhitungan PPh Badan yang kemudian akan memberikan pengaruh terhadap berkurangnya beban pajak perusahaan. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Semakin tinggi tarif bunga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut.

Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut, sehingga utang akan menimbulkan biaya bunga yang akan mengurangi laba bersih perusahaan yang selanjutnya beban pajak perusahaan juga mengalami penurunan. Penelitian Ozkan (2001) menyebutkan bahwa *leverage* yang tinggi dapat mengindikasikan adanya tindakan agresivitas pajak perusahaan. Ini menandakan bahwa perusahaan dengan kewajiban pajak tinggi akan memilih berhutang untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₅ : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*

2.10.6. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Aggressiveness* Melalui *Leverage*

Komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*) (Wijayanti dan Mutmainah, 2012). Pada dasarnya komite audit yang berasal dari luar perusahaan mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Sam'ani, 2008). Sedangkan *leverage* sebagai rasio yang timbul apabila dalam kegiatan operasional perusahaan menggunakan dana pinjaman atau menggunakan dana yang memiliki beban bunga (Jessica dan Toly, 2014).

Pakphan (2012) menjelaskan bahwa ketika perusahaan dihadapkan pada keputusan pendanaan melalui hutang, pemegang saham cenderung untuk menghindari hal tersebut karena risiko yang akan ditanggung. Sedangkan pihak manajemen yang bertugas sebagai profesional akan menyukai hal tersebut, karena adanya ketersediaan dana dan pihak manajemen akan dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi yang menguntungkan manajemen akan adanya insentif yang didapat tanpa memikirkan risiko yang pada dasarnya ditanggung perusahaan. Berdasarkan hipotesis pertama keadaan tersebut memerlukan sistem mekanisme pengawasan yang menimbulkan biaya yang disebut *agency cost*. Untuk meminimalisir *agency cost* perusahaan dapat mengambil salah satu solusi yaitu membentuk komite audit. Keberadaan komite audit sebagai pengawasan akan semakin efektif agar manajemen semakin berhati-hati dalam memperoleh pinjaman, sebab jumlah utang yang semakin meningkat menimbulkan *financial*

distress. Jika keberadaan komite audit semakin banyak maka diharapkan dapat mengurangi tindakan *tax aggressiveness* perusahaan. Jadi, jika komite audit semakin efektif maka *leverage* akan berkurang yang pada akhirnya tindakan *tax aggressiveness* perusahaan akan semakin terminimalisir pula. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₆ : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness* melalui *leverage*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak atau media lain. Data ini berasal dari *annual report* dan laporan keuangan tahunan perusahaan multinasional *non-finance* yang *listing* di BEI periode 2010-2013. Data diperoleh melalui situs website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, website resmi perusahaan terkait penelitian, serta sumber lain yang relevan seperti *Indonesia Capital Market Directory (ICMD)*.

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang sama dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Umar, 2003). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional *non-finance* yang *listing* di BEI periode 2010-2013. Alasan pemilihan perusahaan *non-finance* karena perusahaan *finance* memiliki karakteristik keuangan yang berbeda dengan perusahaan lainnya (Lim, 2011), sehingga dapat menimbulkan hasil penelitian yang bias. Perusahaan *finance* antara lain adalah perusahaan perbankan, institusi keuangan selain bank, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas lainnya.

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan individu yang menjadi obyek penelitian (Umar, 2003). Sampel dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*

yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjek peneliti, sampel dipilih berdasarkan pada kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel ditentukan agar diperoleh sampel yang representatif. Kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan multinasional *non-finance* yang *listing* di BEI periode 2010-2013.
2. Perusahaan yang menerbitkan *annual report* dan laporan keuangan lengkap dan berturut-turut selama periode 2010-2013.
3. Perusahaan yang menggunakan satuan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya selama periode 2010-2013.
4. Perusahaan tidak mengalami perhitungan *tax aggressiveness* negatif selama periode 2010-2013, karena perusahaan dengan hasil perhitungan *tax aggressiveness* negatif merupakan perusahaan yang tidak melakukan tindakan *tax aggressiveness*.

Hasil seleksi sampel berdasarkan kriteria yang dipilih dalam pengambilan sampel berdasarkan kriteria adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan multinasional <i>non-finance</i> yang <i>listing</i> di BEI berturut-turut periode tahun 2010-2013	94
Perusahaan yang tidak mengeluarkan <i>annual report</i> dan laporan keuangan lengkap secara berturut-turut periode tahun 2010-2013	5
Perusahaan menggunakan mata uang selain rupiah	26
Perusahaan mengalami perhitungan BTG negatif	32
Jumlah sampel perusahaan	31
Total sampel selama periode tahun 2010-2013	124

Sumber : Data sekunder diolah, 2015

Tabel 3.1. menjelaskan jumlah perusahaan multinasional *non-finance* periode 2010-2013 yang *listing* di BEI terdapat 94 perusahaan. Setelah dilakukan *purposive sampling* terdapat 31 perusahaan yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan peneliti, sehingga dengan metode *pool data* selama empat tahun periode penelitian akan didapatkan 124 perusahaan multinasional *non-finance*.

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1. Variabel *Endogeneous*

Variabel *endogeneous* dalam penelitian ini adalah *tax aggressiveness*. *Tax aggressiveness* merupakan tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Frank *et al.*, 2009). *Tax aggressiveness* diukur dengan Logaritma Natural *Book Tax Gap* (BTG). *Book Tax Gap* merupakan kesenjangan atau perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan dalam laporan laba rugi menurut peraturan akuntansi dengan laba fiskal atau laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi untuk kepentingan perpajakan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan negara yang bersangkutan (Bovi, 2005). Untuk mencari estimasi *Book Tax Gap* (BTG) dilakukan dengan cara selisih antara laba sebelum pajak yang dilaporkan pada laporan laba rugi (*pretax financial income*) dengan penghasilan kena pajak (*taxable income*).

Pengukuran *tax aggressiveness* dilakukan dengan transformasi data mentah menjadi data yang merupakan nilai logaritma natural (Ln) dari data

perhitungan BTG setiap perusahaan itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil perhitungan *tax aggressiveness* yang lebih baik.

$$\text{BTG} = \text{Ln} (\text{laba sebelum pajak} - \text{penghasilan kena pajak})$$

3.3.2. Variabel *Exogeneous*

3.3.2.1. Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No: Kep-643/BI/2012 komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik dan diketuai oleh komisaris independen. Pengukuran variabel komite audit peneliti mengacu pada penelitian Rahmi (2014) yaitu dengan menghitung jumlah komite audit dalam *annual report* perusahaan. Pemenuhan ukuran komite audit dalam penelitian ini dikatakan sesuai yaitu jika dalam *annual report* perusahaan menyebutkan keberadaan jumlah anggota komite audit.

$$N_i = \text{jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan } i$$

Dimana :

N_i : perusahaan i

3.3.2.2. *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang manfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3). Penentuan indeks

pengungkapan digunakan teknik tabulasi untuk setiap perusahaan berdasarkan daftar/*checklist* pengungkapan. Jika item diungkapkan akan diberikan skor 1 dan jika item tidak diungkapkan akan diberikan skor 0. Penelitian ini mengacu pada indikator yang digunakan oleh Sembiring (2005) karena lebih sesuai dengan keadaan perusahaan di Indonesia dimana pengungkapan CSR-nya masih bersifat rinci dan belum umum. Jumlah item terdiri dari 78 item pengungkapan yang terdiri atas 7 kategori yang terdiri dari kategori lingkungan (13 item), energi (7 item), kesehatan dan keselamatan kerja (8 item), lain-lain tenaga kerja (29 item), produk (10 item), keterlibatan masyarakat (9 item), dan kategori umum (2 item).

Setelah mengidentifikasi item yang diungkapkan oleh perusahaan, hasil pengungkapan item yang diperoleh setiap perusahaan dihitung indeksnya dengan proksi CSRI. Berikut adalah rumus untuk menghitung CSRI:

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

Dimana :

CSRI_j : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i.

$\sum X_{yi}$: nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan.

N_i : jumlah item untuk perusahaan i, $n_i \leq 78$.

3.3.2.3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan keseluruhan dari aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat dilihat dari sisi kiri neraca (Hendriksen, Eldon, 2000). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan

logaritma natural (Ln) total asset perusahaan yang digunakan oleh peneliti sebelumnya seperti Okta dan Heru (2013); Gupta dan Newberry (1997); Noor, Fadzillah, dan Matsuki (2010); Adhikari, Derashid, dan Zhang (2006); serta Lanis dan Richardson (2007) yaitu dengan melakukan transformasi data mentah menjadi data yang merupakan nilai logaritma natural dari data itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil total asset yang lebih baik dan valid.

$$\text{Size} = \text{Ln Total Asset}$$

3.3.3. Variabel *Intervening*

Variabel *intervening* dalam penelitian ini adalah *leverage*. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi (Endrian, 2010). Penelitian ini *leverage* diukur dengan total *debt to equity ratio* yang mengacu pada penelitian Tommy dan Maria (2013); Noor, Fadzillah, dan Matsuki (2010); Gupta dan Newberry (1997); Adhikari, Derashid, dan Zang (2006) dengan rumus rasio utang terhadap modal (*Debt to Equit Ratio*) sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Liabilites}}{\text{Total Equity}}$$

Berdasarkan uraian di atas maka definisi operasional variabel dalam penelitian ini disajikan Tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
<i>Corporate Social Responsibility</i>	Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang manfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3	Perbandingan jumlah item yang diungkapkan perusahaan dengan jumlah item untuk perusahaan (ni = 78) Sembiring (2005)
Komite Audit	Komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik dan diketuai oleh komisaris independen. BAPEPAM-LK No: Kep-643 /Bl/ 2012	Jumlah anggota komite audit perusahaan Rahmi (2014)
Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>)	Keseluruhan dari aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat dilihat dari sisi kiri neraca. Hendriksen, Eldon (2000)	Logaritma natural total aset Oktadan Heru (2013)
<i>Leverage</i>	Kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi. Endrian (2010)	Perbandingan total kewajiban dengan ekuitas Tommy dan Maria (2013)
<i>Tax Aggressiveness</i>	Tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong legal (<i>tax avoidance</i>) atau ilegal (<i>tax evasion</i>). Frank et al., (2009)	Logaritma natural (laba sebelum pajak - penghasilan kena pajak (<i>taxable income</i>)) Bovi (2005); Persada dan Martani (2010)

3.4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2006). Pengumpulan data sekunder ini berupa laporan keuangan dan *annual report* perusahaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi laporan keuangan dan *annual report*

perusahaan multinasional *non-finance* yang *listing* di BEI periode 2010-2013 yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Data tersebut diperoleh dari ICMD, serta dari situs BEI (www.idx.co.id) dan website perusahaan-perusahaan resmi terkait penelitian. Serta dengan melakukan telaah pustaka, mengkaji berbagai literature pustaka seperti buku-buku, jurnal, literatur, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

Periode pengamatan penelitian ini dimulai tahun 2010 hingga 2013 yang menggunakan metode penggabungan data (*pool data*). Panel/*pooled data* adalah tipe data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu pada sejumlah individu/kategori. Data ini merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section* data.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi variabel-variabel dalam penelitian. Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengukuran tentang nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), nilai rata-rata (*mean*), dan nilai simpangan (standar deviasi).

3.5.2. Uji *Goodness of Fit Model*

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*) dengan menggunakan *software Analisis of Moment Structure* (AMOS) *version* 21. Pemilihan metode ini didasarkan pada alasan ingin mengetahui faktor atau jalur manakah yang berpengaruh signifikan. *Path analysis*

adalah pengembangan dari model regresi yang digunakan untuk menguji kesesuaian (*fit*) dari matrik korelasi dari dua atau lebih model yang dibandingkan. Nilai regresi dibandingkan dengan matrik korelasi hasil observasi variabel dan nilai *goodness-of-fit* dihitung. Model terbaik dipilih berdasarkan nilai *goodness-of-fit* (Ghozali, 2013).

Kelayakan model *path analysis* diuji dengan beberapa uji statistika.

Metode untuk melihat uji kelayakan model yang digunakan yaitu:

1) *Chi-Square Statistic*

Statistik chi kuadrat (X^2) adalah ukuran fit model yang paling fundamental. Jika $X^2=0$ menunjukkan fit model yang semakin sempurna. Semakin kecil statistik chi-kuadrat, semakin fit model (Dachlan, 2014).

2) *Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)*

RMSEA ditujukan untuk memperbaiki indeks fit statistik chi-kuadrat (X^2) yang cenderung menolak model yang mempunyai variabel *observed* yang banyak dan ukuran sampel yang besar. Model yang fitnya bagus mempunyai $RMSEA \leq 0,05$ dan model yang tidak fit mempunyai $RMSEA > 0,10$ (Dachlan, 2014).

3) *Goodness-of-Fit Index (GFI)*

GFI merupakan ukuran fit model yang menjelaskan jumlah varians dan kovarians dalam matriks kovarians sampel yang diprediksi oleh matriks kovarians hasil estimasi. Nilai GFI yang disarankan untuk model yang fit adalah lebih besar dari 0,90 (Dachlan, 2014).

4) *Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI)*

AGFI merupakan indeks fit GFI yang derajat kebebasannya disesuaikan terhadap banyaknya variabel. Model fit yang disarankan untuk model fit adalah lebih besar dari 0,90 (Dachlan, 2014).

5) *CMIN/DF*

Indeks fit statistik chi-kuadrat (X^2) sangat sensitif terhadap ukuran sampel dan kompleksitas model yang ditunjukkan dengan derajat kebebasannya. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu cara dengan membagi statistik chi-kuadrat dengan derajat kebebasannya (*degree of freedom*), sehingga akan diperoleh nilai yang lebih rendah yang disebut *Normed Chi-Square (NC)*. Nilai NC sebesar 5,0 sudah cukup bisa diterima untuk menunjukkan model fit. Program aplikasi tertentu untuk SEM biasanya menggunakan notasi *CMIN/DF* untuk menyatakan statistik NC (Dachlan, 2014).

6) *Tucker-Lewis Index (TLI)*

Batas nilai indeks yang biasa digunakan untuk model yang fit adalah $\geq 0,90$, namun karena bukan merupakan indeks fit yang dinormalkan maka nilai TLI bisa lebih rendah dari 0 dan lebih besar dari 1 (Dachlan, 2014).

7) *Comparative Fit Index (CFI)*

CFI merupakan indeks fit perbaikan dari NFI. CFI hadir dengan mempertimbangkan kompleksitas model, yaitu dengan cara menyertakan derajat bebas model dalam perhitungan. Batas nilai indeks yang digunakan untuk model yang fit adalah $\geq 0,90$ (Dachlan, 2014).

Indeks-indeks pengujian kelayakan model dalam dilihat dalam Tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Goodness-of-fit Model

<i>Goodness-of-fit Index</i>	<i>Cut of Value</i>
<i>X²-Chi Square</i>	0; Sempurna; semakin besar semakin tidak fit
<i>Significance Probability</i>	$\geq \alpha$; fit; nilai α yang biasa dipakai: 5%, 1%, 10%
RMSEA	$\leq 0,05$: fit; $> 0,10$: tidak fit
GFI	0: tidak fit; 1: fit sempurna; $\geq 0,90$: fit
AGFI	0: tidak fit; 1: fit sempurna; $\geq 0,90$: fit
CMIN/DF	$\leq 3,0$: fit; $> 5,0$: tidak fit
TLI	0: tidak fit; 1: fit sempurna; $\geq 0,90$: fit
CFI	0: tidak fit; 1: fit sempurna; $\geq 0,90$: fit

Sumber : Dachlan, 2014

3.5.3. Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan pengujian model persamaan struktural dengan metode *goodness of fit*, kemudian untuk melakukan pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat hasil tampilan *output regression weight* yang menunjukkan korelasi antar variabel, sehingga dapat mengetahui ada atau tidak pengaruh antar variabel tersebut.

1. Jika t-hitung (*Critical Ratio* atau C.R) $>$ t-tabel ($\pm 1,96$) untuk taraf signifikansi $\alpha=5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh antara variabel *exogeneous* terhadap variabel *endogeneous*. Dengan demikian hipotesis dapat diterima / terbukti (Ghozali, 2007).
2. Jika t-hitung (*Critical Ratio* atau C.R) $>$ t-tabel ($\pm 2,58$) untuk taraf signifikansi $\alpha=1\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh antara variabel bebas *exogeneous* terhadap variabel *endogeneous*. Dengan demikian hipotesis diterima / terbukti (Dachlan, 2014:363).

3.5.4. Uji Sobel (*Sobel Test*)

Pengujian hipotesis *intervening* dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan Uji Sobel (*Sobel Test*). *Sobel test* merupakan teknik uji signifikansi untuk mengetahui pengaruh variabel mediator. Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel *exogeneous* (X) kepada variabel *endogeneous* (Y) melalui variabel *intervening* (M).

Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalikan jalur X→M (a) dengan jalur M→Y (b) atau ab. Jadi koefisien ab = (c - c¹), dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan c¹ adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M. Standar error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya standar error tidak langsung (*indirect effect*)/Sab dihitung dengan rumus berikut ini :

$$Sab = \sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2}$$

Sedangkan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung perlu menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{Sab}$$

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel dan jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi (Ghozali, 2013).

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian ini berusaha untuk menguji analisis determinan *tax aggressiveness* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Berdasarkan dari hasil pengujian dan pembahasan, peneliti telah meringkas hasil pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *leverage*. Hal ini menunjukkan komite audit mampu mempengaruhi *leverage* perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *leverage* dapat diterima.
2. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini menunjukkan komite audit tidak mampu memberikan pengaruh terhadap *tax aggressiveness* perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness* tidak dapat diterima atau ditolak.
3. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini menunjukkan CSR mampu mempengaruhi tindakan *tax aggressiveness* perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan CSR berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness* dapat diterima.

4. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini menunjukkan ukuran perusahaan mampu mempengaruhi tindakan *tax aggressiveness* perusahaan. Sehingga hipotesis yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness* dapat diterima.
5. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini menunjukkan *leverage* tidak mampu memberikan pengaruh terhadap *tax aggressiveness* perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness* tidak dapat diterima atau ditolak.
6. Pengaruh langsung komite audit terhadap *tax aggressiveness* memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan hubungan tidak langsung antara komite audit terhadap *tax aggressiveness* melalui *leverage*, sehingga *leverage* dinyatakan kurang efektif atas peranannya sebagai variabel *intervening*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam yang menyatakan komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* melalui *leverage* tidak dapat diterima atau ditolak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuranlainnya seperti *Effective Tax Rate (ETR)*, *Book Tax Different (BTD)*, *Current ETR*, *Cash ETR*, dll.

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain terkait dengan mekanisme *good corporate governance* agar mendapatkan hasil yang lebih variatif seperti kepemilikan institusional, dewan komisaris, komisaris independen, kualitas audit, dll.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain terkait karakteristik perusahaan seperti profitabilitas, likuiditas, dan keputusan investasi.
4. Bagi pemerintah perlu mengadakan kerjasama atau membuat peraturan mengenai pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan agar pengungkapan CSR perusahaan lebih efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat, seperti pemotongan pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ageta, Berado. 2014. "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak". Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Marantha.
- Anugerah, R., Hutabarat, R., dan Faradila, W. 2010. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI".
- Ardyansah, Danis. 2014. "Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Rasio* Dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)". Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- BAPEPAM – LK. 2012. Keputusan Ketua BAPEPAM – LK No: Kep-643/BI/2012 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Bovi, Maurizio. 2005. "*Book-Tax Gap. An Income Horse Race*". Roma.
- Carolina, V., Natalia M., dan Debbianita. 2014. "Karakteristik Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Leverage* Sebagai Variabel *Intervening*." Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Marantha.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. 2010. *Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms?. Journal of Financial Economics*, 95, 41-61.
- Choi, Frederick D.S dan Gary K Meek. 2005. *International Accounting* Buku 2-Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Dachlan, Usman. 2014. *Panduan Lengkap Structural Equation Modeling*. Semarang: Lentera Ilmu.
- Desai, M.A dan Dharmapala, D. 2007. "*Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach*".
- Direktorat Jenderal Pajak. 2003. Surat Direktur Jenderal Pajak No: S-14/PJ.7/2003 Tentang Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Tahun 2003 Direktur Jenderal Pajak. Diakses 9 Maret 2015.
- Erly, Suandy dan Marisa Tesa. 2008. *Perencanaan Pajak* Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

- Frank, M., L. Lynch, & S. Rego. 2009. *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting*. *The Accounting Review*, 84 (2), 467-496.
- Fransisca, Maria. 2014. "Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012". Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Marantha.
- Ghozali, Imam. 2013a. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 2014. *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 22*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R., Kouhy, R., Lavers, S. 1995. *Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 8 (2), 47-77.
- Harahap, S.S. 2002. *Teori Akuntansi* Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada.
- Hartadinata, Okta S. dan Tjaraka, Heru. 2013. "Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Aggressiveness* Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010". Surabaya: Fakultas Ekonomu dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Hidayanti, A.N. 2013. "Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan *Corporate Governance* Terhadap Tindakan Pajak Agresif". Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (1996). *Peraturan No. VIII.G.2: Laporan Tahunan. No Kep. 38/PM/1996*. Jakarta: Bapepam.
- Jensen, M.C dan Meckling, W.H. 1976. "*Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*". Dalam *Journal of Financial Economics*. New York: University of Rochester.
- Jensen, M.C. 1986. "*Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers*". Volume 76. No.2. *The American Economic Review*.
- Jessica dan Toly, Agus Arianto. 2014. "Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak". Universitas Kristen Petra.

- Kamila, Putri Almianda dan Martani, Dwi. 2013. "Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak." Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Kim, C dan Zhang, L. 2013. "*Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness*".
- Khurana, Inder K. Dan Moser, William J. 2009. "*Shareholder Investment Horizons and Tax Aggressiveness*". Columbia: University of Missouri.
- Lanis, R dan Richardson, G. 2011. "*Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis*". Dalam *Journal Account Public Policy*. Journal Homepage: www.elsevier.com/locate/jaccpubpol.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Martinez, A.L dan Lessa, R.C. 2014. "*The Effect of Tax Aggressiveness and Corporate Governance on Audit Fees Evidences from Brazil*". Volume 6 No. 1. Dalam *JournalofManagementReserch*. Brazil.
- Murniati, Sari. 2012. "Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi Pada Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan". Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Murwaningsari, E. 2008. "Hubungan *Corporate Governance, Corporate Social Responsibiliies* dan *Corporate Finnacial Performance*". Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Naser, K., Al-Hussaini, A., Al-Kwari, D., & Nuseibeh, R. 2006. "*Determinans of Corporate Social Disclosure in Developing Countries: The Case of Qatar*". *Advance in International Accounting*. 19, 1-23.
- Nuraini, N.S. 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Thin Capitalization* pada Perusahaan Multinasional di Indonesia".
- Octaviana, N.E dan Rohman, A. 2014. "Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap *Corporate Social Responsibility*: Untuk Menguji Teori Legitimasi". Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

- Putri, Fertika Nofisa. 2014. "Pengaruh Karakteristik Kepemilikan dan Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Aggressive*". Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Putri, L.T.Y. 2014. "Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012)". Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Rafael, P., Silanez, F.L.D., dan Shleifer, A. 1999. "*Corporate Ownership Around the World*". Volume 54 No.2. Dalam *Journal of Finance*.
- Riahi, Adan Belkaoui. 2007. *Accounting Theory Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridha, M., dan Martani, D. 2014. "Analisis Terhadap Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia". Lombok: Universitas Indonesia.
- Ronald, C.A., Mansi S.A., dan Reeb D.M. 2004. "*Board Characteristics, Accounting Report Integrity, and the Cost of Debt*". Volume 37 No.3. Dalam *Journal of Accounting & Economics*.
- Sari, D.K dan Martani, D. 2010. "Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, *Corporate Governance*, dan Tindakan Pajak Agresif". Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Sariman, A.S.B, Ali, A., dan Nor, M.N.M. 2013. "*The Mediating Effects of Financial Reporting Quality on Audit Committee Quality and Capital Structure in Omani Firms*". Malaysia: Faculty of Management and Economics Universiti Malaysia Terengganu.
- Scott, William R. 2009. *Financial Accounting Theory, 5th edition*. Prentice Hall Inc.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Solo.
- Simulasi Singkat Tujuh Langkah SEM. Layanan oleh data visit: www.pascalsmart.blogspot.com.
- Siregar, Baldrice. 2008. "Seminar Peran Akuntan Dalam Pengukuran Efektifitas CSR". Yogyakarta.

- Stuart, T dan Zaman, M. 2007. “*Audit Committee Effectiveness: Informal Processes and Behavioural Effects*”. Volume 20 No.5. Dalam *Accounting, Auditing and Accountability Journal*.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak.Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supriyadi, Yadi. “Pelatihan Analisis Data Statistik”.
- Suyanto, Krisnata Dwi, dan Supramono. 2012. “Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan”. Salatiga: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
- Swingly, C dan Sukartha, I.M. 2014. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* Pada *Tax Avoidance*”. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Taylor, G dan Richardson, G. 2012. “*Incentives for Corporate Tax Planning and Reporting: Empirical Evidence from Australia*”. Australia.
- Widhiarso, W. 2009. “Praktek Model Persamaan Struktur (SEM) Melalui Program Amos”. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Widhiarso, W. 2011. “Contoh Analisis Melalui AMOS-Ketika Mediator & Moderator dalam Satu Model”. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Winarsih, R., Prasetyono., dan Kusufi, M.S. 2014. “Pengaruh *GoodCorporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di BEI Tahun 2009-2012)”. Madura: Universitas Trunojoyo.
- Yoehana, M. 2013. “Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak”. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zemzem, Ahmed dan Ftouhi, Khaoula. 2013. “*The Effects of Board of Directors’ Characteristics on Tax Aggressiveness*”. Tunisia.

LAMPIRAN 1

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN SAMPEL

No.	Kode	Nama Perusahaan
1.	ADES	Akasha Wira International Tbk
2.	AKRA	AKR Corporation Tbk
3.	ARNA	Arwana Citramulia Tbk
4.	ASGR	Astra Graphia Tbk
5.	ASII	Astra International Tbk
6.	ATPK	ATPK Resources Tbk
7.	AUTO	Astra Otoparts Tbk
8.	BUVA	PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
9.	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk
10.	DLTA	Delta Djakarta Tbk
11.	EXCL	XL Axiata Tbk
12.	GREN	Evergreen Invesco Tbk
13.	GSMF	Equity Development Investment Tbk
14.	HERO	Hero Supermarket Tbk
15.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
16.	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
17.	JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
18.	KBLV	First Media Tbk
19.	LION	Lion Metal Works Tbk
20.	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
21.	MYOH	Samindo Resources Tbk
22.	MYOR	Mayora Indah Tbk
23.	PTSP	Pioneerindo Gourmet International Tbk
24.	SIMP	Salim Ivomas Pratama Tbk
25.	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk
26.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
27.	SONA	Sona Topas Tourism Industry Tbk
28.	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk
29.	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk
30.	UNTR	United Tractors Tbk
31.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk

Sumber : *Indonesian Capital Market Directory, Annual Report*

LAMPIRAN 2

ITEM-ITEM PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

LINGKUNGAN	1.	Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset & pengembangan untuk pengurangan polusi
	2.	Pernyataan yg menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi
	3.	Pernyataan yg menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi
	4.	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, misalnya, reklamasi daratan atau reboisasi
	5.	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi , minyak, air dan kertas
	6.	Penggunaan material daur ulang
	7.	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan
	8.	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan
	9.	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan
	10.	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah
	11.	Pengolahan limbah
	12.	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan
	13.	Perlindungan lingkungan hidup
ENERGI	14.	Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi
	15.	Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi
	16.	Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang
	17.	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi
	18.	Peningkatan efisiensi energi dari produk
	19.	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk
	20.	Kebijakan energi perusahaan
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	21.	Mengurangi polusi, iritasi, atau risik dalam lingkungan kerja
	22.	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental

	23.	Statistik kecelakaan kerja
	24.	Mentaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja
	25.	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja
	26.	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja
	27.	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja
	28.	Pelayanan kesehatan tenaga kerja
LAIN-LAIN TENAGA KERJA	29.	Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat
	30.	Persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat managerial
	31.	Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan
	32.	Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat
	33.	Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja
	34.	Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan
	35.	Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja
	36.	Bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan
	37.	Perencanaan kepemilikan rumah karyawan
	38.	Fasilitas untuk aktivitas rekreasi
	39.	Presentase gaji untuk pensiun
	40.	Kebijakan penggajian dalam perusahaan
	41.	Jumlah tenaga kerja dalam perusahaan
	42.	Tingkatan managerial yang ada
	43.	Disposisi staff-dimana staff ditempatkan
	44.	Jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka
	45.	Statistik tenaga kerja, misal: penjualan per tenaga kerja
	46.	Kualifikasi tenaga kerja yang direkrut
	47.	Rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja
	48.	Rencana pembagian keuntungan lain
	49.	Informasi hub manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja
	50.	Informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan
	51.	Laporan tenaga kerja yang terpisah
	52.	Hubungan perusahaan dengan serikat buruh
	53.	Gangguan dan aksi tenaga kerja

	54.	Informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan
	55.	Kondisi kerja secara umum
	56.	Re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja
	57.	Statistik perputaran tenaga kerja
PRODUK	58.	Pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya
	59.	Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk
	60.	Informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk
	61.	Produk memenuhi standar keselamatan
	62.	Membuat produk lebih aman untuk konsumen
	63.	Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan
	64.	Peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk
	65.	Informasi atas keselamatan produk perusahaan
	66.	Informasi mutu produk yg dicerminkan dalam penerimaan penghargaan
	67.	Informasi yg dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misalnya ISO 9000)
KETERLIBATAN MASYARAKAT	68.	Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masy, pendidikan & seni
	69.	Tenaga kerja paruh waktu dari mahasiswa/pelajar
	70.	Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat
	71.	Membantu riset medis
	72.	Sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni
	73.	Membiayai program beasiswa
	74.	Ada fasilitas perusahaan untuk masyarakat
	75.	Sponsor kampanye nasional
76.	Mendukung pengembangan industri lokal	
UMUM	77.	Tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat
	78.	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas

Sumber: Sembiring (2005)

LAMPIRAN 3

HASIL PERHITUNGAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
TAHUN 2010-2013

No.	Kode	2010	2011	2012	2013
1.	ADES	0,22	0,22	0,22	0,22
2.	AKRA	0,24	0,23	0,29	0,32
3.	ARNA	0,33	0,38	0,41	0,41
4.	ASGR	0,41	0,45	0,45	0,41
5.	ASII	0,4	0,4	0,4	0,41
6.	ATPK	0,06	0,06	0,06	0,06
7.	AUTO	0,33	0,4	0,41	0,41
8.	BUVA	0,14	0,14	0,14	0,19
9.	CITA	0,14	0,14	0,14	0,14
10.	DLTA	0,08	0,08	0,06	0,08
11.	EXCL	0,41	0,41	0,4	0,41
12.	GREN	0,14	0,14	0,17	0,14
13.	GSMF	0,05	0,05	0,05	0,05
14.	HERO	0,15	0,17	0,17	0,15
15.	INDF	0,56	0,58	0,56	0,56
16.	INTP	0,33	0,35	0,33	0,35
17.	KBLV	0,26	0,27	0,27	0,26
18.	JPFA	0,1	0,1	0,1	0,13
19.	LION	0,06	0,08	0,08	0,06
20.	MLBI	0,22	0,23	0,22	0,24
21.	MYOH	0,28	0,28	0,28	0,29
22.	MYOR	0,19	0,19	0,19	0,19
23.	PTSP	0,4	0,4	0,4	0,4
24.	SIMP	0,38	0,38	0,38	0,37
25.	SMDM	0,1	0,12	0,12	0,12
26.	SMGR	0,14	0,18	0,14	0,17
27.	SONA	0,06	0,06	0,06	0,06
28.	TSPC	0,09	0,1	0,09	0,09
29.	UNIT	0,06	0,05	0,04	0,04
30.	UNTR	0,33	0,33	0,32	0,49
31.	UNVR	0,27	0,31	0,29	0,29

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

LAMPIRAN 4

HASIL PERHITUNGAN KOMITE AUDIT TAHUN 2010-2013

No.	Kode	2010	2011	2012	2013
1.	ADES	3	3	3	3
2.	AKRA	3	3	3	3
3.	ARNA	3	4	3	3
4.	ASGR	3	3	3	3
5.	ASII	4	4	4	4
6.	ATPK	3	3	3	3
7.	AUTO	3	3	3	3
8.	BUVA	3	3	3	3
9.	CITA	3	3	3	3
10.	DLTA	3	3	3	3
11.	EXCL	4	4	4	4
12.	GREN	3	3	3	3
13.	GSMF	5	5	5	5
14.	HERO	3	3	3	3
15.	INDF	4	4	4	3
16.	INTP	3	3	3	3
17.	KBLV	3	3	3	3
18.	JPFA	3	3	3	3
19.	LION	3	3	3	3
20.	MLBI	3	3	3	3
21.	MYOH	3	3	3	3
22.	MYOR	3	3	3	3
23.	PTSP	3	3	3	3
24.	SIMP	3	3	3	3
25.	SMDM	3	3	3	2
26.	SMGR	3	3	4	3
27.	SONA	3	3	3	3
28.	TSPC	3	3	3	3
29.	UNIT	3	3	3	3
30.	UNTR	3	3	3	3
31.	UNVR	3	3	3	3

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

LAMPIRAN 5

HASIL PERHITUNGAN UKURAN PERUSAHAAN TAHUN 2010-2013

No.	Kode	2010	2011	2012	2013
1.	ADES	26,51	26,48	26,69	26,81
2.	AKRA	29,67	29,76	30,10	30,31
3.	ARNA	27,50	27,45	28,36	28,54
4.	ASGR	27,62	27,75	27,85	28,00
5.	ASII	32,36	32,67	32,84	33,00
6.	ATPK	25,71	25,44	25,74	28,03
7.	AUTO	29,35	29,57	29,82	30,17
8.	BUVA	27,51	27,49	27,83	28,02
9.	CITA	27,99	28,21	28,31	28,96
10.	DLTA	27,29	27,27	27,34	27,49
11.	EXCL	30,94	31,07	31,20	31,33
12.	GREN	27,04	27,06	27,09	27,15
13.	GSMF	28,39	28,46	28,85	28,96
14.	HERO	28,77	28,94	29,29	29,68
15.	INDF	31,49	31,61	31,72	31,99
16.	INTP	30,36	30,53	30,76	30,91
17.	KBLV	28,14	28,94	29,09	29,29
18.	JPFA	29,57	29,74	30,03	30,33
19.	LION	26,44	26,63	26,80	26,94
20.	MLBI	27,76	27,83	27,77	28,21
21.	MYOH	26,58	19,86	27,89	28,23
22.	MYOR	29,11	29,52	29,75	29,90
23.	PTSP	25,41	25,62	26,04	26,25
24.	SIMP	30,68	30,87	30,91	30,97
25.	SMDM	28,36	28,53	28,60	28,71
26.	SMGR	30,38	30,61	30,91	31,06
27.	SONA	27,16	27,24	27,56	27,57
28.	TSPC	28,91	29,08	29,16	29,32
29.	UNIT	26,46	26,44	26,66	26,85
30.	UNTR	31,02	31,47	31,55	31,68
31.	UNVR	29,79	29,98	30,11	30,22

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

LAMPIRAN 6

HASIL PERHITUNGAN *LEVERAGE* TAHUN 2010-2013

No.	Kode	2010	2011	2012	2013
1.	ADES	2,25	1,51	0,86	0,67
2.	AKRA	1,68	1,32	1,80	1,73
3.	ARNA	1,10	0,72	0,44	0,52
4.	ASGR	1,11	1,02	0,96	0,97
5.	ASII	0,92	1,02	1,03	1,02
6.	ATPK	0,70	1,89	2,44	0,33
7.	AUTO	0,36	0,47	0,62	0,32
8.	BUVA	0,92	0,68	0,60	0,77
9.	CITA	0,78	0,87	0,73	0,80
10.	DLTA	0,19	0,22	0,25	0,28
11.	EXCL	1,33	1,28	1,31	1,63
12.	GREN	0,19	0,21	0,22	0,29
13.	GSMF	2,69	2,61	3,74	3,56
14.	HERO	1,72	1,62	2,18	0,45
15.	INDF	0,90	0,70	0,74	1,04
16.	INTP	0,17	0,15	0,17	0,16
17.	KBLV	1,15	0,54	0,78	1,15
18.	JPFA	1,00	1,18	1,30	1,84
19.	LION	0,17	0,21	0,17	0,20
20.	MLBI	1,41	1,30	2,49	0,80
21.	MYOH	1,21	1,36	3,77	1,32
22.	MYOR	1,16	1,72	1,71	1,47
23.	PTSP	1,64	0,90	0,72	0,60
24.	SIMP	1,16	0,68	0,65	0,74
25.	SMDM	0,17	0,19	0,25	0,38
26.	SMGR	0,28	0,35	0,46	0,41
27.	SONA	1,47	0,56	0,76	0,72
28.	TSPC	0,36	0,40	0,38	0,40
29.	UNIT	0,30	0,27	0,58	0,90
30.	UNTR	0,84	0,69	0,56	0,61
31.	UNVR	1,15	1,85	2,02	2,14

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

LAMPIRAN 7

HASIL PERHITUNGAN TAX AGGRESSIVENESS TAHUN 2010-2013

No.	Kode	2010	2011	2012	2013
1.	ADES	21,77	22,73	24,62	24,71
2.	AKRA	24,34	24,08	24,26	26,10
3.	ARNA	25,19	25,46	25,19	25,75
4.	ASGR	24,03	23,55	24,09	24,28
5.	ASII	30,46	30,69	30,72	30,73
6.	ATPK	21,52	18,97	18,86	23,44
7.	AUTO	27,75	27,60	27,52	27,35
8.	BUVA	24,85	24,33	25,00	25,05
9.	CITA	26,06	26,60	26,53	27,54
10.	DLTA	25,07	24,94	24,31	24,88
11.	EXCL	26,72	25,07	27,44	27,05
12.	GREN	21,48	21,53	22,41	22,37
13.	GSMF	24,66	25,03	25,22	25,29
14.	HERO	25,68	26,62	24,88	27,14
15.	INDF	29,07	29,40	29,28	29,13
16.	INTP	26,18	26,49	26,54	25,57
17.	KBLV	23,56	25,48	26,64	26,84
18.	JPFA	27,76	26,56	26,94	25,77
19.	LION	20,51	22,56	24,01	22,45
20.	MLBI	25,75	25,96	24,57	26,85
21.	MYOH	24,60	24,55	25,83	26,17
22.	MYOR	26,53	26,59	26,82	26,84
23.	PTSP	22,41	22,83	23,03	23,11
24.	SIMP	27,86	28,35	27,54	25,63
25.	SMDM	22,96	24,42	24,67	24,11
26.	SMGR	28,19	28,18	28,39	28,50
27.	SONA	25,10	25,25	25,51	25,18
28.	TSPC	26,47	26,76	26,81	26,86
29.	UNIT	20,84	21,47	20,23	22,17
30.	UNTR	28,55	29,04	29,17	29,19
31.	UNVR	23,75	24,53	26,07	25,81

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

LAMPIRAN 8

HASIL OUTPUT SPSS 21.0

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Hasil Analisis Statistik Deskriptif CSR

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	124	,04	,58	,2335	,14155
Valid N (listwise)	124				

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Komite Audit

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KOMITE	124	,69	1,61	1,1420	,12913
Valid N (listwise)	124				

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE	124	19,86	33,00	28,7729	1,95942
Valid N (listwise)	124				

Hasil Analisis Statistik Deskriptif *Leverage*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LEVERAGE	124	,15	3,77	,9831	,73959
Valid N (listwise)	124				

Hasil Analisis Statistik Deskriptif *Tax Aggressiveness*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAG	124	18,86	30,73	25,4859	2,38177
Valid N (listwise)	124				

LAMPIRAN 9**HASIL OUTPUT AMOS 21.0****UJI KELAYAKAN MODEL****CMIN**

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	13	2,814	2	,245	1,407
Saturated model	15	,000	0		
Independence model	5	191,026	10	,000	19,103

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	,070	,991	,933	,132
Saturated model	,000	1,000		
Independence model	,941	,639	,458	,426

Baseline Comparisons

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	,985	,926	,996	,978	,996
Saturated model	1,000		1,000		1,000
Independence model	,000	,000	,000	,000	,000

Parsimony-Adjusted Measures

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	,200	,197	,199
Saturated model	,000	,000	,000
Independence model	1,000	,000	,000

RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	,058	,000	,198	,346
Independence model	,384	,337	,432	,000

HASIL ESTIMATE**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
LEVERAGE	<--- KOMITE	2,320	,472	4,914	***	par_8
TAG	<--- CSR	2,310	1,024	2,256	,024	par_1
TAG	<--- KOMITE	1,436	1,165	1,233	,218	par_2
TAG	<--- SIZE	,849	,077	10,972	***	par_3
TAG	<--- LEVERAGE	-,238	,193	-1,230	,219	par_7

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

		Estimate
LEVERAGE	<--- KOMITE	,405
TAG	<--- CSR	,138
TAG	<--- KOMITE	,078
TAG	<--- SIZE	,704
TAG	<--- LEVERAGE	-,074

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
LEVERAGE	,164
TAG	,633

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)

	SIZE	KOMITE	CSR	LEVERAGE
LEVERAGE	,000	2,320	,000	,000
TAG	,849	1,436	2,310	-,238

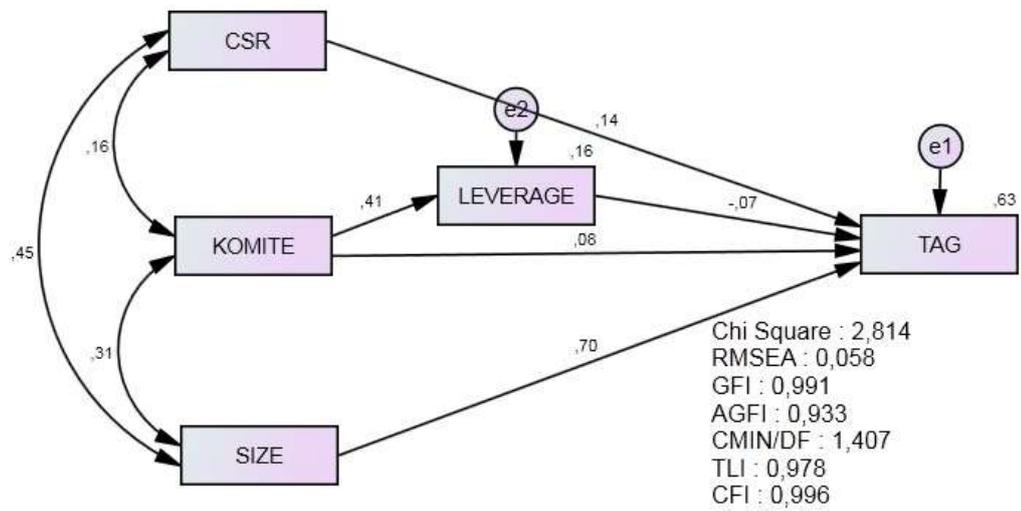
Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	SIZE	KOMITE	CSR	LEVERAGE
LEVERAGE	,000	,405	,000	,000
TAG	,704	,078	,138	-,074

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	SIZE	KOMITE	CSR	LEVERAGE
LEVERAGE	,000	,000	,000	,000
TAG	,000	-,030	,000	,000

PATH DIAGRAM



LAMPIRAN 10

**LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
SAMPEL**

PT. NUSANTARA INTI CORPORA, Tbk
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010